

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2020**



**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Ruang Lingkup
- II. Sekilas Tentang SPIP
 - A. Pengertian
 - B. Tujuan SPIP
 - C. Unsur-unsur SPIP
 - 1. Lingkungan Pengendalian
 - 2. Penilaian Resiko
 - 3. Aktivitas Pengendalian
 - 4. Informasi dan Komunikasi
 - 5. Pemantauan Berkelanjutan
 - D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)
- III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
 - A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik
 - B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
 - C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
- IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian
 - A. Pernyataan Tujuan
 - B. Risiko-risiko
 - C. Pengendalian Terpasang
 - D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
- V. Informasi dan Komunikasi
- VI. Pemantauan dan Evaluasi
- VII. Penutup
- Lampiran

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
KECAMATAN SUTERA
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan Negara dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara/Daerah.

Kecamatan Sutera sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Kecamatan Sutera secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Sutera dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Kecamatan Sutera adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan dan prosedur, organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Sutera, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Sutera yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Kecamatan Sutera dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Sutera.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Sutera. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawaidan unit kerja di lingkungan Kecamatan Sutera. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Definisi SPI dan SPIP bagi Kecamatan Sutera sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan

dikembangkan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diarah dengan cara menjaga dan mengembangkan aset Negara/Desa yang diantaranya meliputi Kemandirian Sotera, menjaga terdapatnya laporan manajerial yang handal, mematuhi ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kegiatan, pengurangan termasuk kekurangan/fund, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPDP

Pengembangan SPDP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaksanaan keuangan, pengendalian aset Negara dan ketahanan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur - Unsur SPDP

Pengembangan SPDP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu struktur yang kondusif yang mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern di lingkungan Kecamatan Sotera.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (*perilaku/nilai* organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Pencapaian integritas dan nilai etika,
- b. Komitmen terhadap kompetensi,

- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan

pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Kecamatan Sutera untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Lengayang sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Sutera dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Wali Kota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi

perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Sutera memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Kecamatan Sutera.

Tujuan pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sutera :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Sutera mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Kecamatan Sutera; (2 Kasubag, 5 Kasi dan 1 Sekretaris Kecamatan dan 1 Camat) telah

melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Kasubag, Kasi, Sekcam dan Camat pada Kecamatan Sutera.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1: Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Sutera untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Kecamatan Sutera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sutera, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kecamatan Sutera menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Setelah tersusun dan disosialisasi dokumen kode etik disampaikan ke seluruh aparatur.
		Kegiatan Sosialisasi kode etik akan dipraktikkan bagaimana penerapannya sehari-hari di tengah masyarakat
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Setelah Perjanjian Kinerja tahun 2020 di tandatangani oleh seluruh aparatur menjadi acuan kompetensi Kecamatan
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Proses validasi dilakukan secara berkala agar ada ketepatan data yang akurat
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Memverifikasi dan menguji kewenangan pimpinan
		Proses tingkat otoritas disesuaikan dengan ketentuan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Kecamatan Sutera. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Sutera diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sutera, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan perundang-undang yang berlaku;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan.

B. Resiko-resiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Kecamatan Sutera, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Kecamatan Sutera.

Risiko Pencapaian Tujuan 1:

- Belum maksimalnya tampilan budaya daerah dan kurangnya barang-barang hasil kerajinan daerah yang di pameran

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Tidak tercapainya efisien dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya

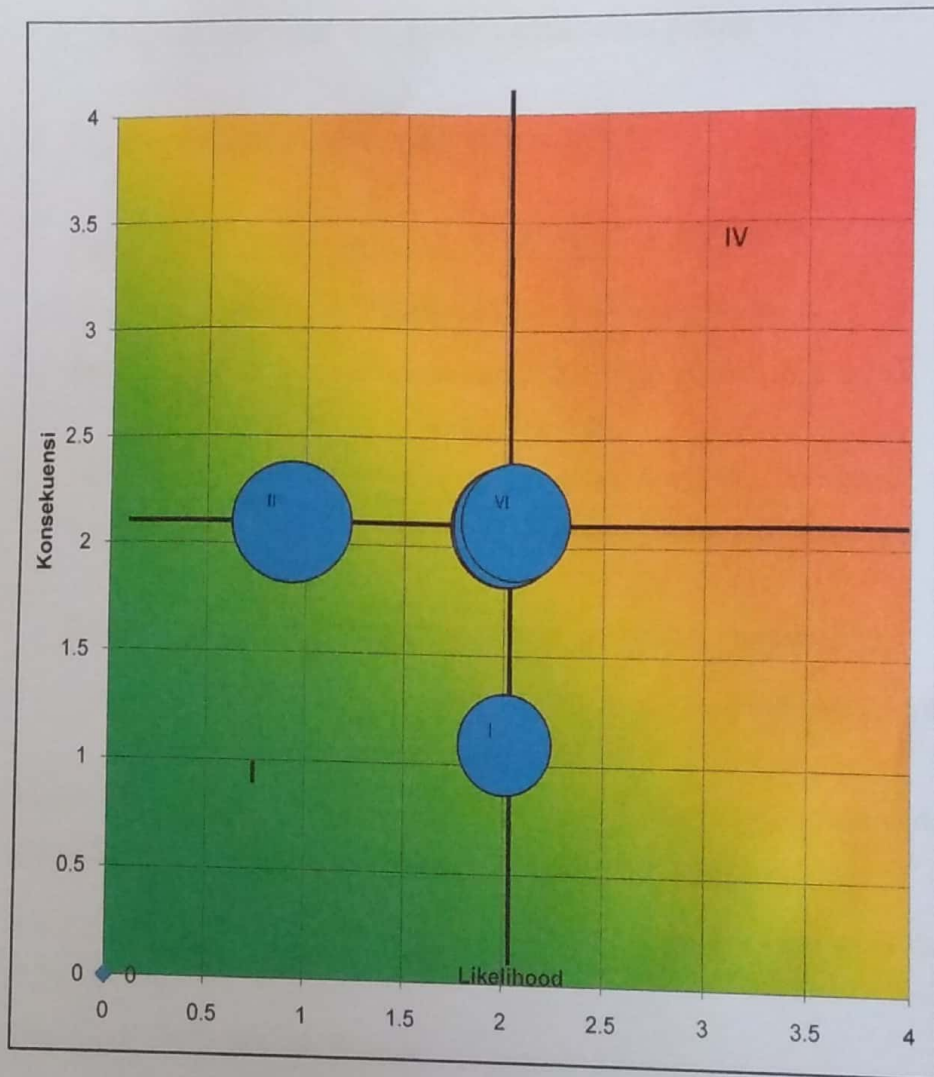
Risiko Pencapaian Tujuan 3:

Perlu adanya bimbingan dari orang Tua dan Guru serta adanya bimbingan darisegi Agama dan serta Pemerintahan yang ada di lingkungan OPD

Risiko Pencapaian Tujuan 4:

- Tidak terealsasinya kegiatan PKK

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

A. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Kecamatan Sutera telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Kecamatan Sutera. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan pelayanan yang dilakukan disetiap seksi dan sekretariat.
- b. Kegiatan Pelatihan Aparatur
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

B. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Tujuan 1:- Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana Sanggar.

- Pelatihan ketrampilan Kerajinan bagi masyarakat

Tujuan 2 : Adanya pelimpahan wewenang SKPD Kabupaten ke Kecamatan untuk dapat mengeluarkan Perizinan

Tujuan 3 : Perlu adanya bimbingan dari orang Tua dan Guru serta adanya bimbingan dari segi Agama dan serta Pemerintahan yang ada di lingkungan OPD

Tujuan 4: - Melakukan Pelatihan ketrampilan dan kerajinan bagi TP-PKK

- Menampung dan memperkenalkan hasil kerajinan yang telah di hasilkan oleh masyarakat dan PKK Khususnya

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Kecamatan Sutera dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Kecamatan Sutera terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan
 - Surat undangan, bahan evaluasi, laptop, printer dll
- b. Review Pengadaan Barang dan Jasa dan Monitoring Pelaksanaan Fisik

- Rapat, sosialisasi, Rapat koordinasi, Surat Tugas
- c. Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Sutera
 - Rapat Koordinasi, Surat Undangan, Surat Tugas

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Kecamatan Sutera adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Kecamatan Sutera sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Inspektur atau Irban pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Kecamatan Sutera sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Kecamatan Sutera.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Kecamatan Sutera.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Kecamatan Sutera.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir

Selatan selaku auditor Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Kecamatan Sutera. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Sutera Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

LAMPIRAN I
RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Setelah tersusun dan di sosialisasi dokume kode etik disampaikan ke seluruh aparatur	BKPSDM	Dikonsultasikan dengan Kepala OPD
		Kegiatan Sosialisasi kode etik akan di praktekan bagaimana penerapannya sehar-hari di tengah masyarakat	BKPSDM	Dikonsultasikan dengan Kepala OPD
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;			
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;			
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Proses validasi dilakukan secara berkala agar ada ketepatan data yang akurat	BKPSDM	Dikonsultasikan dengan Kepala OPD
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;	Memverifikasi dan menguji kewenangan pimpinan	BKPSDM	Dikonsultasikan dengan Kepala OPD
		Proses tingkat otoritas disesuaikan dengan ketentuan	BKPSDM	Dikonsultasikan dengan Kepala OPD
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA;			
7	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF			
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT			

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI
LAMPIRAN II

NO	URAIAN	KETERANGAN
TUJUAN I: Memupuk rasa cinta dan melestarikan kebudayaan daerah dan pengembangan produk hasil kerajinan daerah		
1	Pernyataan Risiko	Belum maksimalnya tampilan budaya daerah dan kurangnya barang-barang hasil kerajinan daerah yang di pameran
2	Pemilik Risiko	Dinas Pariwisata
3	Penyebab	Belum tersalurkannya minat, bakat dan ketrampilan masyarakat yang ada di Kecamatan
4	Dampak Pada Capaian Tujuan	Tidak ada kepuasan pengunjung pameran seni budaya
TUJUAN II : Meningkatkan efisien dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi -fungsi pemerintahan secara transparan		
1	Pernyataan Risiko	Tidak tercapainya efisien dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya
2	Pemilik Risiko	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
3	Penyebab	Belum adanya pelimpahan wewenang dari Kabupaten
4	Dampak Pada Capaian Tujuan	Masyarakat merasa sulit untuk berurusan ke Kabupaten
TUJUAN III : Penurunan Kasus Narkoba Di Tingkat Pelajar dan Menjadikan Anak Terbebas dari Kecanduan Narkoba.		
1	Pernyataan Risiko	Jika tidak diadakan penyuluhan bagi pelajar tentang bahaya Narkoba maka bagi pelajar tidak akan mengerti tentang akibat bahaya Narkoba.
2	Pemilik Risiko	PPTK
3	Penyebab	Kurang nya pengetahuan dan Kopetensi Aparatur Kecamatan dalam Melakukan pembinaan untuk Pelajar
4	Dampak Pada Capaian Tujuan	Kurangnya Pengetahuan bagi pelajar akibat yag akan menjadi bahaya Narkoba dan minuman keras.
TUJUAN IV : Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui program PKK		
1	Pernyataan Risiko	Tidak terealsasinya kegiatan PKK
2	Pemilik Risiko	PPTK / TP-PKK-
3	Penyebab	Keluarga dan masyarakat kurang peduli dengan program kegiatan PKK
4	Dampak Pada Capaian Tujuan	Kegiatan PKK tidak berjalan sebagaimana mestinya

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LAMPIRAN III

NO	URAIAN	KETERANGAN
TUJUAN I : Memupuk rasa cinta dan melestarikan kebudayaan daerah dan pengembangan produk hasil kerajinan daerah		
1	Pernyataan Risiko	Belum maksimalnya tampilan budaya daerah dan kurangnya barang-barang hasil kerajinan daerah yang di pameran
2	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian	Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana Sanggar, Pelatihan ketrampilan Kerajinan bagi masyarakat
3	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Dinas Pariwisata, Dinas Koperindag
4	Target Waktu Penyelesaian	Februari s/d Desember
TUJUAN II: Meningkatkan efisien dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi -fungsi pemerintahan secara transparan		
1	Pernyataan Risiko	Tidak tercapainya efisien dan efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya
2	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian	Adanya pelimpahan wewenang OPD Kabupaten ke Kecamatan untuk dapat mengeluarkan Perizinan
3	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4	Target Waktu Penyelesaian	Februari s/d Desember
TUJUAN III: Penurunan Kasus Narkoba Di Tingkat Pelajar dan Menjadikan Anak Terbebas dari Kecanduan Narkoba.		
1	Pernyataan Risiko	Tidak mengerti tentangb akibat bahaaya Narkoba
2	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian	Diadakan Penyuluhan bagi Aparat yang berwenang untuk menngani.
3	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Kesbangpol.
4	Target Waktu Penyelesaian	Februari s/d Desember
TUJUAN IV : Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui program PKK		
1	Pernyataan Risiko	Tidak terealsasinya kegiatan PKK
2	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian	Melakukan Pelatihan ketrampilan dan kerajinan bagi TP-PKK, Menampung dan memperkenalkan hasil kerajinan yang telah di hasilkan oleh masyarakat dan PKK Khususnya.
3	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Kasi Kesra, Dinas Koperindag
4	Target Waktu Penyelesaian	Februari s/d Desember

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN
LAMPIRAN IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
TUJUAN I : Memupuk rasa cinta dan melestarikan kebudayaan daerah dan pengembangan produk hasil kerajinan daerah		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana Sanggar, Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat.
2	Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian	Proposal permohonan bantuan kelengkapan sanggar, Sosialisasi / Pelatihan
3	Penyedia Informasi	Kecamatan
4	Penerima Informasi	Dinas Koperindag, Dinas Dukcapil
5	Waktu Pelaksanaan	Bulan Februari
TUJUAN II : Meningkatkan efisien dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi -fungsi pemerintahan secara transparan		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Adanya pelimpahan wewenang OPD Kabupaten ke Kecamatan untuk dapat mengeluarkan Perizinan
2	Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian	Surat permohonan pelimpahan wewenang
3	Penyedia Informasi	Kecamatan
4	Penerima Informasi	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5	Waktu Pelaksanaan	Bulan Februari
TUJUAN III : Penurunan Kasus Narkoba Di Tingkat Pelajar dan Menjadikan Anak Terbebas dari Kecanduan Narkoba.		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Diadakan Sosialisasi bagi pelar tiap sekolah.
2	Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian	Sosialisai ke Sekolah-sekolah.
3	Penyedia Informasi	Kecamatan
4	Penerima Informasi	Kesbangpol
5	Waktu Pelaksanaan	Bulan Februari
TUJUAN IV: Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui program PKK		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Melakukan pelatihan ketrampilan dan kerajinan bagi TP-PKK, Menampung dan memperkenalkan hasil kerajinan yang telah di hasilkan oleh masyarakat dan PKK Khususnya
2	Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian	Sosialisasi / Pelatihan, Reklame/Iklan
3	Penyedia Informasi	Kecamatan, Dinas Koperindag
4	Penerima Informasi	Masyarakat/ PKK
5	Waktu Pelaksanaan	Bulan Februari

LAMPIRAN V

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN		
NO	URAIAN	KETERANGAN
TUJUAN I: Memupuk rasa cinta dan melestarikan kebudayaan daerah dan pengembangan produk hasil kerajinan daerah		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana Sanggar, Pelatihan ketrampilan Kerajinan bagi masyarakat
2	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Pemantauan berkelanjutan
3	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Camat beserta OPD Kabupaten
4	Waktu Pelaksanaan Pemantauan	1 Tahun
TUJUAN II : Meningkatkan efisien dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi -fungsi pemerintahan secara transparan		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Adanya pelimpahan wewenang OPD Kabupaten ke Kecamatan untuk dapat mengeluarkan Perizinan
2	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Pemantauan berkelanjutan
3	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Camat beserta OPD Kabupaten
4	Waktu Pelaksanaan Pemantauan	1 Tahun
TUJUAN III: Penurunan Kasus Narkoba Di Tingkat Pelajar dan Menjadikan Anak Terbebas dari Kecanduan Narkoba.		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Diadakan Sosialisasi bagi pelajar tiap sekolah
2	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Pemantauan berkelanjutan
3	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Camat beserta OPD Kabupaten
4	Waktu Pelaksanaan Pemantauan	1 Tahun
TUJUAN IV : Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui program PKK		
1	Pengendalian yang Direncanakan	Melakukan Pelatihan ketrampilan dan kerajinan bagi TP-PKK, Menampung dan memperkenalkan hasil kerajinan yang telah di hasilkan oleh masyarakat dan PKK Khususnya
2	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Pemantauan berkelanjutan
3	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Camat beserta OPD Kabupaten
4	Waktu Pelaksanaan Pemantauan	1 Tahun

